



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Udayana Nomor. 11, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon. (0370) 7507817, Faksimile (0370) 645828
Laman dprd-ntbprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Surya Bahari, MMPd

Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hassanudin

Jabatan : Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 2025

Pihak Kedua,

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Hassanudin

Pihak Pertama,

Sekretaris DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat,

Drs. H. Surya Bahari., MMPd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680219 198811 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah (Persen)	100
		Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran (Persen)	100
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif (Persen)	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD Atas Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD (Kategori)	Baik
		Tingkat Kepuasan Masyarakat (Persepsi)	Baik

Program	Anggaran	Keterangan
Program Dukungan 1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp. 64.487.329.060	Sumber Dana : APBD, Mendukung Sasaran Strategis No. 1 dan Indikator Kinerja No. 1, 2 dan 3 Sumber Dana : APBD, Mendukung Sasaran Strategis No. 2 dan Indikator Kinerja No. 4 dan 5

Mataram, 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat,

Sekretaris DPRD Provinsi
Nusa Tenggara Barat,



Hassanudin



Drs. H. Surya Bahari., MMPd
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680219 198811 1 001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Jalan Udayana No. 11 Telp. (0370) 645828 Mataram

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sabirin Alam, SE, M.Ak
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Surya Bahari, MMPd
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi NTB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

KEPALA BAGIAN KEUANGAN


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001


SABIRIN ALAM, SE, M.Ak

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1043

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	I	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Kategori/Point BB
1	Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	26 Dokumen
2	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen
3	Meningkatnya Jumlah Jenis Layanan Keuangan DPRD	3	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan	65 Orang/Bulan
II	Terpenuhinya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	II	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran	100 Persen
4	Meningkatnya Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Anggaran	4	Jumlah Laporan Rekomendasi Kebijakan Anggaran	5 Laporan
5	Meningkatnya Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2 Dokumen

Program/Kegiatan		Anggaran		Keterangan
A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Program I dan Indikator I.
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	608.147.200	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 1 dan Indikator 1
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	11.812.739.785	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 2 dan Indikator 2
3	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Rp.	42.128.309.360	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 3 dan Indikator 3
B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Program II dan Indikator II.
4	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Rp.	1.429.768.500	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 4 dan Indikator 4

5 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Rp. 515.847.000 Sumber Dana : APBD.
Aspirasi Masyarakat Mendukung Sasaran Nomor 5
dan Indikator 5

Mataram, 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

KEPALA BAGIAN KEUANGAN


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1968021 198811 1 001


SABIRIN ALAM, SE, M.Ak
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701231 199803 1043



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Jalan Udayana No. 11 Telp. (0370) 645828 Mataram

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Joko Hartono, SH
Jabatan : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Surya Bahari, MMPd
Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi NTB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram, 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001


TRI JOKO HARTONO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700410 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN PERSIDANGANG DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	I	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Kategori/ Point BB
1.	Meningkatnya Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	1.	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	3 Jenis Layanan
II	Terpenuhinya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Legislasi, Budgeting dan Pengawasan DPRD	II	Persentase Pembahasan Rancangan Perda	100 Persen
		III	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif	100 Persen
	Meningkatnya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	IV	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen
2.	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	2.	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	9 Perda dan Peraturan
3.	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	3.	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	5 Laporan
4.	Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	4.	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65 Orang
5.	Meningkatnya Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 Laporan
6.	Meningkatnya Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	6.	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan
7.	Meningkatnya Jumlah Jenis fasilitasi tugas DPRD	7.	Jumlah Jenis fasilitasi tugas DPRD	4 Jenis Fasilitasi

Program/Kegiatan		Anggaran		Keterangan
I. Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi				Sumber Dana ; APBD. Mendukung Sasaran Program I dan Indikator I.
1	Kegiatan Layanan Adminstrasi DPRD	Rp.	739.804.520	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 1 dan Indikator 1
II. Program Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Program II dan Indikator II III dan IV.
2	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Rp.	12.991.063.600	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 2 dan Indikator 2
3	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	606.433.660	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 3 dan Indikator 3

4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Rp.	5.087.548.200	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 4 dan Indikator 4
5	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Rp.	25.140.778.150	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 5 dan Indikator 5
6	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Rp.	50.108.950	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 6 dan Indikator 6
7	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Rp.	19.181.628.000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 7 dan Indikator 7

Mataram,

2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001


TRI JOKO HARTONO, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700410 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Jalan Udayana No. 11 Telp. (0370) 645828 Mataram

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Erwan, S.STP.

Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi NTB

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. Surya Bahari, MMPd

Jabatan : Sekretaris DPRD Provinsi NTB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mataram,

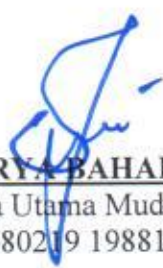
2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001


MUHAMAD ERWAN, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761209 199612 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	I	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Kategori/ Point BB
1.	Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	1	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 Persen
2.	Meningkatnya Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen
3.	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen
4.	Meningkatnya Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	4	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit
5.	Meningkatnya Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen
6.	Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	90 Unit
7.	Meningkatnya Jumlah Jenis Layanan Keuangan DPRD	7	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2 Paket
		8	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang
8.	Meningkatnya Jumlah Jenis Layanan Administrasi DPRD	9	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	12 Paket
II	Meningkatnya Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	II	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen
9.	Meningkatnya Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas	10	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2 Dokumen
		11	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	2 Dokumen

Program/Kegiatan	Anggaran		Keterangan
I. Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Program I dan Indikator I.
1. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	13.152.000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 1 dan Indikator 1
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	261.980.200	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 2 dan Indikator 2
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	3.467.893.855	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 3 dan Indikator 3
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	3.399.424.800	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 4 dan Indikator 4

- | | | | | |
|---|--|-----|---------------|---|
| 5. | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah | Rp. | 6.264.310.520 | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 5
dan Indikator 5 |
| 6. | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah | Rp. | 8.838.094.208 | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 6
dan Indikator 6 |
| 7. | Kegiatan Layanan Keuangan dan
Kesejahteraan DPRD | Rp. | 1.287.750.000 | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 7
dan Indikator 7 dan 8 |
| 8. | Kegiatan Layanan Administrasi DPRD | Rp. | 420.000.000 | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 8
dan Indikator 9 |
|
II. Program Dukungan pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD | | | | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Program II
dan Indikator II. |
| 9. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD | Rp. | 1.117.660.000 | Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 9
dan Indikator 10 dan 11 |

Mataram,

2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTB

Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN
UMUM DAN HUMAS


Drs. H. SURYA BAHARI, MMPd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680219 198811 1 001


MUHAMAD ERWAN, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761209 199612 1001



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

Jalan Udayana No. 11 Telp. (0370) 645828 Mataram

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Baiq Indiawati, S.IP
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhamad Erwan, S.STP
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Provinsi NTB

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

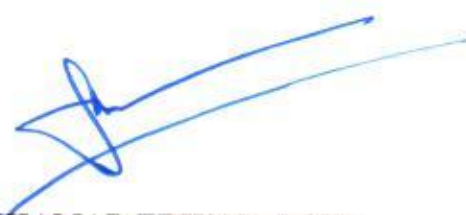
Mataram, 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN UMUM DAN HUMAS

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA


MUHAMAD ERWAN, S.STP

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761209 199612 1001


Baiq Indiawati, S.IP

Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19691231 198903 2043

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

No	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 unit
2.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
3.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang
4.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	20 Orang
5.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
6.	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
7.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan

Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran		Keterangan
I. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Rp.	30.051.000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 1 dan Indikator 1
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp.	22.929.200	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 2 dan Indikator 2
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	40.000.000	Mendukung Sasaran Nomor 3 dan Indikator 3
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	169.000.000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 4 dan Indikator 4
II. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	162.303.000	Sumber Dana : APBD. Mendukung Sasaran Nomor 5 dan Indikator 5
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp.	25.272.100	Mendukung Sasaran Nomor 6 dan Indikator 6

III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 194.555.000 Sumber Dana : APBD.
Mendukung Sasaran Nomor 7 dan
Indikator 7

Mataram, 2025

Pihak Kedua,

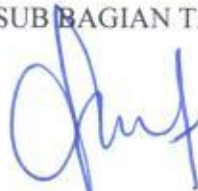
KEPALA BAGIAN UMUM DAN
HUMAS



MUHAMAD ERWAN, S.STP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19761209 199612 1001

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Baiq Indriawati, S.IP
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19691231 198903 2043